

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penerapan PSAK 109 pernah diteliti oleh penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Megawati (2014) menyimpulkan, bahwa sudah sesuai penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Pekanbaru yang dibuktikan dengan mengambil bagian dana amil yang dipotong $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari masing-masing dana zakat dan infak/sedekah. Kemudian dalam penyaluran zakatnya, BAZNAS Kota Pekanbaru membuat 5 program yaitu, Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Takwa, dan Pekanbaru Peduli. Dalam memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah, BAZNAS Kota Pekanbaru membuat rekening khusus untuk memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah dalam penerimaannya sehingga pada pelaporan posisi keuangan (neraca) telah memisahkan penerimaan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana nonhalal.

Pertiwi (2015) mengungkapkan, bahwa perlakuan akuntansi Zakat dan Infak di LAZISNU Kabupaten Malang ada beberapa poin yang sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu pengakuan dan penyaluran. Namun pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Zakat dan Infak/sedekah belum sesuai dengan PSAK

109. Selain itu LazisMu juga tidak memisahkan dana zakat dan dana amil infak. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif bersifat studi kasus.

Anggraeni (2016) menunjukkan, bahwa BAZNAS Kota Bitung belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK no.109, karena untuk penyusunannya BAZNAS Kota Bitung hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Ritonga (2017) mendeskripsikan penelitiannya, bahwa perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Kemudian laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK NO. 109. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan jenis data bersifat kualitatif.

Wati dkk, (2017) menyimpulkan, bahwa BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan PSAK no. 109. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan

catatan atas laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memberi gambaran yang detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek penelitian.

Hidayat dkk, (2018) mengungkapkan bahwa Rumah Yatim Arrohman sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari implementasi PSAK 109 yang sudah sesuai ini diantaranya ialah manajemen organisasi pengelola zakat yang profesional dan adanya bantuan dari software khusus untuk pelaporan keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara laporan keuangan yang disusun Rumah Yatim Arrohman dan PSAK 109.

Dewi dkk, (2019) menunjukkan hasil penelitiannya, bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109, dan konsep yang diterapkan LAZIS maupun LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 di hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitis dan merupakan penelitian kualitatif.

B. Tinjauan Pustaka

1. Akuntansi Zakat PSAK 109

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan. Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

Dalam pernyataan PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di dalam PSAK No. 109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Penerapan perlakuan akuntansi ZIS dalam hal ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Zakat 109 (PSAK 109) yang diterbitkan oleh IAI sebagai standar pelaporan keuangan bagi amil dalam

menyusun laporan keuangan Lembaga Amil Zakat. Ruang lingkupnya sebatas penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan amil.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2017), amil yang mendapat izin dari regulator maupun tidak, wajib menerapkan PSAK 109 ini. Fatwa MUI yang dijadikan rujukan sebagai berikut :

1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang kriteria, tugas amil amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah islam.
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat
4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik menerima dana zakat.

2. Konsep Zakat, Infak, dan Shadaqah

A. Zakat

Zakat dari segi Bahasa memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Ada dua jenis zakat, yaitu zakat jiwa/fitrah dan zakat harta.

Menurut Sharif (2014, hlm 92) zakat jiwa/fitrah adalah sedekah yang bersifat wajib bagi setiap muslim yang dihaskan membayar tidak hanya untuk dirinya sendiri saja melainkan juga untuk keluarga, anak-anak, dan pembantu dan budaknya. Ukuran zakat fitri bisa dalam bentuk gandum, tepung, kurma, dan sebagainya adalah satu *sha'* yang setara dengan 112 ons. Diperbolehkan juga membayar harganya dan harus dibayar di Bulan Ramadhan sebelum dilangsungkan shalat Idul Fitri. Kemudian zakat harta mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temua, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri. Ada beberapa macam objek dari zakat harta;

Tabel 2.1 Tabel Perhitungan Zakat Maal

| No | Jenis Harta | Nisab | Kadar Zakat % |
|----|--|---|---|
| 1 | Emas | 20 dinar yaitu \pm 96 gram | 2,5% |
| 2 | Perak | 200 dirham yaitu 672 gram | 2,5% |
| 3 | Perniagaan | Standar emas (dihitung berdasarkan harga emas) | 2,5% |
| 4 | Peternakan a. Kambing/ domba b. Sapi/kerbau | 40-120 ekor 121-200 ekor 201-399 ekor 400-...ekor Setiap bertambah 100 ekor 30-39 ekor 40-59 ekor 60-69 ekor 70-79 ekor 80-89 ekor Setiap bertambah 30 ekor | 1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 2 tahun lebih 3 ekor umur 2 tahun lebih 4 ekor umur 2 tahun lebih Tambah satu ekor lagi 1 ekor umur 1 tahun lebih 1 ekor umur 2 tahun lebih 2 ekor umur 1 tahun lebih 2 ekor umur 2 tahun lebih 3 ekor umur 1 tahun lebih Tambah satu ekor lagi |
| 5 | Pertanian/tanaman pokok(padi,jagung, dan sagu/gandum) | 5 wasak = 750 kg = 930 liter | 10% bila diari dengan air hujan/air sungai 5% bila diairi dengan alat-alat penyiram yang membutuhkan biaya tambahan |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 6 | Barang temuan berupa emas dan perak Barang selain emas dan perak | Tanpa harus menunggu satu tahun tanpa syarat nisab | 20% pada saat menemukannya 20% |
| 7 | Lain-lain: -Perikanan -Tanaman hias -Profesi -Perkebunan | Perhitungan uang dan alat tukar berdasarkan standar harga emas dan perak yang berlaku | 2,5% |

B. Infak

Menurut Bahasa, infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminology artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seseorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah SWT dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut.

C. Shadaqah

Shadaqah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Karakteristik zakat, infak, dan shadaqah terdapat di dalam PSAK No. 109 (IAI, 2008:109.3) dan dijelaskan beberapa macam karakteristik dari zakat, infak, dan shadaqah yang tercantum tersebut;

- a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur

mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

- b. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
- c. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

3. Sumber Hukum Zakat, Infak, dan Shadaqah

a. Al-Quran

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Makkah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah). Sedangkan kata shadaqah sendiri sebanyak 12 kali yang semuanya diturunkan di Madinah. Shadaqah mempunyai arti kata shidiq yang berarti benar. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat dan kebinasaan atas harta yang dimilikinya (QS 41:6-7,9:35). Sebaliknya Al-Quran juga memberikan pujian dan menjelaskan kebaikan apa yang akan diperoleh dengan menunaikan zakat sehingga diharapkan dapat memotivasi manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut (QS 30:39).

b. As-Sunnah

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR Tabrani)

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR Bazar dan Baihaqi)

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan shadaqah mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

a. Pengakuan Awal

Zakat Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang

diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

d. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi

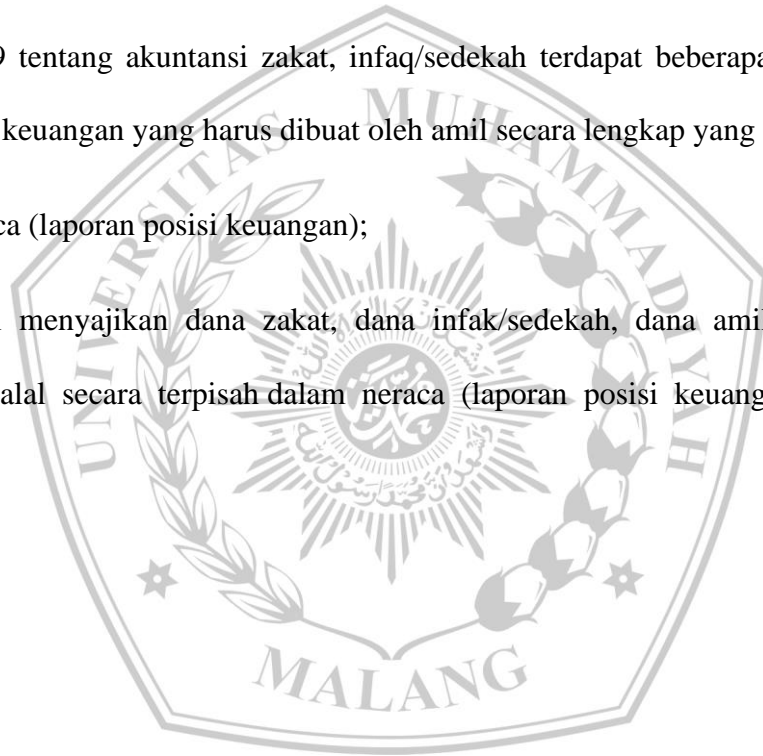
dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

e. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan);

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)



Tabel 2.2 Laporan Posisi Keuangan PSAK 109

Laporan Posisi Keuangan
BAZ “XYZ”
Per 31 Desember 20XX

| Keterangan | Rp | Keterangan | Rp |
|----------------------|-------|----------------------------------|-----|
| Aset | | Liabilitas | |
| Aset lancar | xxx | Liabilitas jangka pendek | xxx |
| Kas dan setara kas | xxx | Biaya yang masih harus dibayar | xxx |
| Piutang | xxx | Liabilitas jangka panjang | |
| Aset tidak lancar | | Liabilitas imbalan kerja | |
| Aset tetap | xxx | Jumlah liabilitas | xxx |
| Akumulasi penyusutan | (xxx) | Saldo dana | xxx |
| | | Dana zakat | xxx |
| | | Dana infak/sedekah | xxx |
| | | Dana amil | xxx |
| | | Jumlah dana | |
| Jumlah aset | xxx | Jumlah liabilitas dan saldo dana | xxx |

2. Laporan perubahan dana;

| | |
|--|---|
| DANA AMIL Penerimaan Bagian amil dari dana zakat Bagian amil dari dana infak/sedekah Penerimaan lainnya <i>Jumlah penerimaan dana amil</i> Penggunaan Beban pegawai Beban penyusutan Beban umum dan administrasi lainnya <i>Jumlah penggunaan dana amil</i> Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir | xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx xxx xxx |
| DANA NONHALAL Penerimaan Bunga bank Jasa giro Penerimaan nonhalal lainnya <i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i> Penggunaan <i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i> Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir | xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx |
| <i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i> | xxx |

3. Laporan perubahan aset kelolaan;

Tabel 2.4. Laporan Perubahan Aset Kelolanaan

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

| | Saldo awal | Penambahan | Pengurangan | Penyisihan | Akumulasi penyusutan | Saldo akhir |
|---|------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir) | xxx | xxx | (xxx) | (xxx) | - | Xxx |
| Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah) | xxx | xxx | (xxx) | - | (xxx) | xxx |

4. Laporan arus kas; dan

5. Catatan atas laporan keuangan.

6. Lembaga Keuangan Syariah

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan Undang-undang RI No 23 Tahun 2011 ada dua jenis OPZ yang diakui:

- 1) Badan Amil Zakat adalah organisasi yang dibentuk pemerintah sebagai organisasi pengelola zakat.

2) Lembaga Amil Zakat adalah organisasi bentukan masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah sebagai organisasi pengelola zakat. Membentuk lembaga amil zakat wajib mendapatkan izin dari menteri yang ditunjuk sesuai peraturan Badan Amil Zakat UU no 23 Tahun 2011 Pasal 18 ayat 1. Syarat yang terdapat dalam pasal 18 adalah : terdaftar sebagai organisasi islam yang mengelola berbagai bidang seperti pendidikan, dakwah, dan sosial, mendapat rekomendasi dari badan amil zakat nasional, berbentuk lembaga yang berbadan hukum, memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya dalam melaksanakan kegiatan, memiliki program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit secara berkala.

